

Prediksi Soal TKA

1

Nama

Kelas

No. Absen

Langkah Pengerjaan

1. Isilah Nama, Kelas, dan No. Absen.
2. Kerjakan soal sesuai perintahnya.
 - Untuk pilihan ganda, klik pada lingkaran huruf di depan jawaban yang benar.
 - Untuk pilihan ganda kompleks jawablah dengan mencentang semua jawaban benar.
3. Pastikan semua jawaban sudah Anda isi.
4. Setelah semua soal selesai Anda jawab, Simpan jawaban Anda.
5. Kirimkan kepada guru Anda melalui WhatsApp atau email.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menekankan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Nilai ini menuntut bangsa Indonesia memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Contoh sikap yang paling mencerminkan makna sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah
 - (a.) mematuhi semua perintah tanpa mempertanyakan kebenarannya
 - (b.) memberi bantuan hanya kepada orang yang seagama
 - (c.) menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara kekerasan
 - (d.) menyuarakan hak orang lain yang tertindas tanpa memandang latar belakangnya
 - (e.) menolak hidup berdampingan dengan orang yang berbeda pandangan
2. Penegakan hukum harus berdasarkan asas kepastian hukum agar setiap orang tahu hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari perbuatannya. Akibat asas kepastian hukum tidak dijalankan dengan baik dalam penegakan hukum adalah
 - (a.) masyarakat menjadi bingung dan tidak yakin terhadap aturan hukum
 - (b.) hukum menjadi lebih cepat ditegakkan
 - (c.) penegak hukum lebih bebas dalam bertindak
 - (d.) meningkatkan keadilan bagi semua pihak
 - (e.) membuat hukum lebih fleksibel dan tidak kaku
3. Setiap korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai putusan pengadilan HAM. Ketiga hal tersebut penting dalam konteks HAM untuk
 - (a.) agar negara tidak dipersalahkan atas pelanggaran
 - (b.) mengembalikan hak dan martabat korban serta memberikan keadilan
 - (c.) sebagai bentuk hukuman terhadap korban
 - (d.) supaya pelaku tidak diadili secara hukum
 - (e.) agar korban menerima dana tanpa proses hukum

4. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan agama kerap menjadi sumber konflik. Di sebuah kota besar, terjadi kasus intoleransi ketika sekelompok warga melarang perayaan hari besar keagamaan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Penolakan itu disebarluaskan di media sosial dan memicu reaksi negatif antarwarga. Solusi paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut agar sesuai nilai Pancasila adalah
- (a.) melarang seluruh perayaan agama di tempat umum
 - (b.) menyerahkan masalah ke aparat tanpa dialog antarwarga
 - (c.) mendorong dialog antarumat beragama untuk menciptakan saling pengertian
 - (d.) menyebarkan opini tandingan di media sosial sebanyak mungkin
 - (e.) mewajibkan semua warga mengikuti perayaan agama mayoritas
5. Dalam sidang BPUPK, Soepomo menyampaikan usulan dasar negara yang menekankan integrasi antara rakyat dan negara tanpa adanya dominasi individu. Mohammad Yamin mengusulkan lima asas, salah satunya “ketuhanan”, sedangkan Sukarno mengusulkan Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 yang dianggap paling memuat semangat persatuan. Makna utama dari beragamnya usulan dasar negara oleh para tokoh dalam sidang BPUPK adalah
- (a.) perbedaan pandangan harus diseragamkan agar cepat diambil keputusan
 - (b.) para tokoh mengutamakan kepentingan ideologi partai masing-masing
 - (c.) perumusan dasar negara dilakukan secara musyawarah demi menyatukan berbagai pandangan
 - (d.) perbedaan usulan menunjukkan kurangnya persiapan para pendiri bangsa
 - (e.) usulan Sukarno langsung diterima tanpa revisi karena paling lengkap
6. Seorang warga Indonesia bernama Aditya mengeluhkan jalan kampungnya yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Ia merasa pemerintah mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas umum. Namun, setelah ditelusuri, sebagian besar warga kampung itu tidak membayar pajak kendaraan dan tanah selama bertahun-tahun. Bahkan, banyak yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan warga kampung Aditya menunjukkan bahwa
- (a.) pemerintah telah lalai dalam memenuhi seluruh hak warga negara
 - (b.) warga negara hanya memiliki kewajiban jika haknya sudah terpenuhi lebih dahulu
 - (c.) hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan secara seimbang
 - (d.) setiap warga negara bebas menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban
 - (e.) kewajiban warga negara baru berlaku jika ada sanksi dari pemerintah

7. Hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban umum dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara individu, seperti kontrak dan hak milik. Alasan hukum pidana dan hukum perdata perlu dipisahkan dalam sistem hukum karena
- (a.) hukum pidana lebih penting daripada hukum perdata
 - (b.) hukum pidana menangani pelanggaran masyarakat, sementara hukum perdata menangani perselisihan antarindividu
 - (c.) hukum perdata hanya berlaku untuk pejabat negara
 - (d.) hukum pidana tidak memerlukan proses peradilan
 - (e.) hukum perdata hanya untuk kasus kriminal
8. Pengadilan HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat yang masih berusia di bawah 18 tahun. Konsekuensi hukum yang berlaku bagi pelaku di bawah umur tersebut adalah
- (a.) pelaku tetap diadili oleh pengadilan HAM dengan hukuman berat
 - (b.) pengadilan anak yang lebih memerhatikan aspek rehabilitatif
 - (c.) pelaku dibebaskan tanpa proses hukum
 - (d.) kasus dialihkan ke pengadilan internasional
 - (e.) pelaku harus dihukum berdasarkan hukum internasional tanpa pertimbangan usia
9. Otonomi daerah memungkinkan tiap daerah menggali potensi ekonomi lokal. Namun, beberapa kebijakan daerah tidak mendukung investasi karena terlalu banyak perizinan. Untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah daerah sebaiknya
- (a.) menutup peluang investor luar
 - (b.) menaikkan pajak daerah agar pendapatan meningkat
 - (c.) menyederhanakan perizinan dan mendorong iklim usaha
 - (d.) menyerahkan seluruh kebijakan ke pemerintah pusat
 - (e.) menghapus seluruh regulasi investasi

10. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak warga negara yang lebih menuntut haknya dibanding melaksanakan kewajiban. Misalnya, seseorang menuntut pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah, tetapi ia menolak ikut program vaksinasi nasional dan tidak membayar iuran BPJS secara rutin. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang paling mencerminkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah
- (a.) menolak vaksinasi karena hak atas kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya
 - (b.) menuntut pelayanan gratis meskipun tidak pernah mengikuti program pemerintah
 - (c.) mengikuti vaksinasi dan membayar iuran BPJS sebagai wujud tanggung jawab
 - (d.) menolak BPJS dan lebih memilih pengobatan tradisional karena merasa tidak cocok
 - (e.) menyebarkan kritik tentang buruknya pelayanan kesehatan tanpa solusi yang membangun
11. Indonesia sebagai negara kepulauan diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat dengan Deklarasi Djuanda yang menyatukan wilayah laut dan darat sebagai satu kesatuan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Deklarasi Djuanda dan pengakuan internasional melalui UNCLOS 1982 sangat strategis bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya karena
- (a.) mengubah batas laut menjadi 3 mil dari pantai seperti zaman kolonial
 - (b.) menghilangkan batas laut antarpulau dan menganggap seluruh laut sebagai wilayah satu kesatuan negara
 - (c.) memperbolehkan kapal asing bebas melewati wilayah laut Indonesia tanpa izin
 - (d.) membatasi akses nelayan tradisional Indonesia ke laut daerahnya sendiri
 - (e.) mengabaikan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara
12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26, warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban tertentu, termasuk ketentuan tentang naturalisasi. Seseorang dapat menjadi WNI melalui naturalisasi biasa atau istimewa. Seorang warga asing yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia ingin menjadi WNI tanpa melalui prosedur naturalisasi biasa. Berdasarkan prinsip UUD status naturalisasi yang tepat untuk kasus ini dan alasan di baliknya adalah
- (a.) naturalisasi biasa karena harus memenuhi semua persyaratan administratif
 - (b.) naturalisasi istimewa karena negara dapat memberikan kewarganegaraan kepada warga asing yang berjasa tanpa prosedur biasa
 - (c.) tidak bisa menjadi WNI karena harus mengikuti aturan naturalisasi biasa
 - (d.) naturalisasi biasa dengan syarat membayar uang pewarganegaraan saja
 - (e.) naturalisasi istimewa hanya berlaku bagi anak-anak warga negara asing

13. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerja sama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerja sama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah
- (a.) penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama
 - (b.) membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
 - (c.) menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
 - (d.) mengangkat gubernur dan bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia
 - (e.) menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi
14. Salah satu kendala pelaksanaan otonomi daerah adalah praktik politik nepotisme yang menyebabkan kualitas kepemimpinan daerah menurun. Langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mencegah politik nepotisme adalah
- (a.) menunda pilkada
 - (b.) membatasi masa jabatan kepala daerah menjadi satu periode
 - (c.) membentuk aturan seleksi terbuka dan transparan untuk calon kepala daerah
 - (d.) menunjuk langsung kepala daerah oleh Presiden
 - (e.) memberikan hak pilih hanya pada kalangan tertentu
15. Lembaga negara yang secara konstitusional wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana berat lainnya adalah
- (a.) Mahkamah Agung
 - (b.) Mahkamah Konstitusi
 - (c.) Dewan Perwakilan Rakyat
 - (d.) Dewan Perwakilan Daerah
 - (e.) Badan Pengawas Keuangan
16. Seorang murid mengikuti program pertukaran pelajar ke provinsi lain yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang sangat berbeda dari daerah asalnya. Meski awalnya mengalami "*culture shock*", ia mencoba beradaptasi, menghargai perbedaan adat, mengikuti kegiatan lokal, dan aktif menjalin komunikasi dengan teman-teman barunya. Perilaku murid tersebut menunjukkan kontribusi terhadap penguatan integrasi nasional dengan cara
- (a.) menunjukkan keunggulan budaya daerah sendiri
 - (b.) menyesuaikan diri untuk diterima secara sosial dan budaya
 - (c.) mengubah budaya lokal agar sesuai dengan kebiasaan pribadi
 - (d.) menolak budaya daerah lain untuk menjaga kemurnian identitas
 - (e.) mengisolasi diri agar tidak terpengaruh oleh budaya asing

17. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan suku, agama, ras, dan bahasa dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Jika keberagaman ini dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas, maka akan muncul keharmonisan sosial. Prinsip utama yang harus diterapkan agar kebinekaan menjadi kekuatan sosial bangsa adalah
- (a.) menghindari interaksi antarbudaya untuk menjaga harmoni
 - (b.) menyeragamkan kebudayaan agar tidak terjadi konflik
 - (c.) menjaga identitas masing-masing kelompok secara tertutup
 - (d.) mengedepankan toleransi, komunikasi, dan kerja sama antarkelompok
 - (e.) mengabaikan perbedaan karena semua warga memiliki hak yang sama
18. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan wilayah yang sangat luas. Ketimpangan pembangunan antardaerah dan penyebaran hoaks berpotensi menimbulkan konflik sosial yang mengancam keutuhan NKRI. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya persatuan, kesatuan, serta keadilan dalam pembangunan dan komunikasi untuk menjaga stabilitas negara. Berikut langkah yang tepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman ketimpangan pembangunan dan penyebaran hoaks agar keutuhan NKRI tetap terjaga adalah
- (a.) mengutamakan pembangunan di daerah perkotaan saja agar cepat maju secara ekonomi
 - (b.) mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang merata dan meningkatkan literasi digital untuk melawan hoaks
 - (c.) membatasi akses informasi sosial media agar hoaks tidak mudah tersebar
 - (d.) memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengatur pembangunan tanpa campur tangan pusat
 - (e.) mengabaikan keberagaman budaya demi menciptakan persamaan dalam kehidupan masyarakat
19. Seorang warga negara bernama Raka memanfaatkan media sosial secara aktif dan terbuka untuk menyuarakan pendapatnya tentang kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya merugikan masyarakat. Dalam unggahannya tersebut, ia menyampaikan kritik yang disertai data, alasan logis, serta solusi alternatif. Namun, beberapa warganet menyerang balik secara emosional, bahkan menyebarkan data pribadi Raka. Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, sikap Raka mencerminkan
- (a.) penggunaan kebebasan berekspresi tanpa batas
 - (b.) penyampaian aspirasi secara anarkis
 - (c.) pelaksanaan hak demokratis dengan tanggung jawab sosial
 - (d.) upaya menggulingkan kekuasaan dengan opini
 - (e.) penolakan terhadap hasil musyawarah bersama

20. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang transportasi, seperti kereta api dan pesawat terbang, telah secara signifikan mengubah cara mobilitas masyarakat modern. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara di berbagai daerah. Sikap yang paling tepat dalam menyikapi kemajuan teknologi transportasi ini adalah
- (a.) menolak seluruh kemajuan transportasi karena dampaknya yang negatif
 - (b.) menerima semua kemajuan transportasi tanpa mempertimbangkan dampaknya
 - (c.) memilih untuk tidak menggunakan transportasi modern dan tetap menggunakan transportasi tradisional
 - (d.) mencari solusi untuk meminimalkan dampak negatif transportasi modern dan memanfaatkan kelebihannya
 - (e.) membatasi penggunaan transportasi modern agar tidak menimbulkan masalah
21. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali. Namun, dalam suatu daerah, sebagian masyarakat memutuskan untuk tidak ikut memilih karena menganggap semua calon pemimpin tidak jujur dan tidak layak dipilih. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat lain yang tetap ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan harapan perubahan dapat dicapai melalui jalur konstitusional. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila adalah
- (a.) tidak menggunakan hak pilih karena kecewa pada calon
 - (b.) menggunakan kekuatan massa untuk memboikot pemilu
 - (c.) tetap berpartisipasi dan mendorong perbaikan sistem secara konstitusional
 - (d.) menyerahkan seluruh keputusan pada elite politik
 - (e.) menyebarkan isu bahwa demokrasi tidak berguna
22. Perkembangan teknologi komunikasi modern memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung dengan cepat, mudah, dan tanpa batasan geografis. Namun demikian, penyebaran informasi yang tidak terkontrol dan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kesalahpahaman, disinformasi, serta konflik sosial yang merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, langkah terbaik yang dapat dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah timbulnya konflik adalah
- (a.) menyebarkan informasi tanpa klarifikasi agar cepat diketahui banyak orang
 - (b.) memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikan ke orang lain
 - (c.) menghindari diskusi soal isu sosial di media sosial
 - (d.) membatasi komunikasi hanya dengan orang yang sepaham
 - (e.) menggunakan teknologi untuk menyebarkan pendapat pribadi tanpa batas

23. Indonesia menjadi mediator dalam konflik antara pemerintah Filipina dan pemberontak Moro melalui forum OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Filipina-Moro menunjukkan bahwa Indonesia

- ☐ a. mengutamakan hubungan militer antarnegara ASEAN
- ☐ b. menghindari konflik dengan negara lain
- ☐ c. mampu menjadi penengah dalam konflik internasional dengan pendekatan damai
- ☐ d. mendukung salah satu pihak dalam konflik agar cepat selesai
- ☐ e. menetapkan Filipina sebagai wilayah pengaruh Indonesia

24. Dalam suatu debat politik terbuka, salah satu peserta menyatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial dianggap lebih stabil dibandingkan sistem parlementer karena Presiden tidak mudah digulingkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Namun, ia juga mengakui bahwa sistem ini berpotensi memunculkan kekuasaan yang bersifat mutlak apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif dari lembaga legislatif.

Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu tantangan dalam sistem presidensial, yaitu

- ☐ a. kurangnya peran rakyat dalam pemilu
- ☐ b. dominasi legislatif dalam pengambilan keputusan
- ☐ c. minimnya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif
- ☐ d. tidak adanya pemisahan kekuasaan
- ☐ e. pemerintah pusat bisa membubarkan parlemen sewaktu-waktu

25. Indonesia secara aktif dan konsisten mengirim Kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik, seperti Kongo, Lebanon, dan Sudan. Langkah ini mencerminkan peran penting Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan global secara berkelanjutan. Tindakan Indonesia yang mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara konflik tersebut menunjukkan bahwa Indonesia

- ☐ a. ingin memperkuat pengaruh militernya di dunia internasional
- ☐ b. ingin menjadikan pasukannya lebih tangguh melalui latihan perang sesungguhnya
- ☐ c. ingin memperluas wilayah kekuasaan di negara lain
- ☐ d. berkomitmen menjaga perdamaian dunia sebagai bagian dari tanggung jawab internasional
- ☐ e. ingin menambah kekuatan militer negara-negara sahabat

26. Wawasan Nusantara menekankan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Prinsip “persatuan tanpa penyeragaman” menjadi hal yang krusial dalam konteks keberagaman wilayah, budaya, dan suku bangsa Indonesia karena
- (a.) penyeragaman akan memudahkan pemerintah mengontrol rakyat
 - (b.) penyeragaman berpotensi menghilangkan identitas budaya daerah dan menimbulkan konflik
 - (c.) persatuan harus dicapai dengan menghilangkan perbedaan
 - (d.) keberagaman budaya bukan bagian penting dari identitas nasional
 - (e.) persatuan hanya berdasarkan kesamaan bahasa dan agama
27. Dalam sistem pemerintahan suatu negara, parlemen memiliki peran dominan. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara secara simbolis. Jika parlemen mencabut dukungannya, maka kabinet dapat dibubarkan sewaktu-waktu. Karakteristik sistem pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut menganut
- (a.) presidensial dengan otoritas penuh parlemen
 - (b.) republik absolut yang dipimpin Presiden
 - (c.) parlementer dengan supremasi parlemen
 - (d.) serikat dengan kepala negara ganda
 - (e.) kesatuan dengan model presidensial
28. Selama masa demokrasi terpimpin, Presiden membubarkan parlemen dan membentuk DPR-GR. Keputusan-keputusan penting negara diambil oleh Presiden tanpa musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat. Hak menyampaikan pendapat pun dibatasi. Berdasarkan uraian tersebut, penyimpangan utama yang terjadi dalam demokrasi masa itu adalah
- (a.) pemerintah memfasilitasi musyawarah melalui DPR-GR
 - (b.) rakyat diberi kebebasan penuh dalam menentukan kebijakan
 - (c.) prinsip kedaulatan rakyat digantikan oleh dominasi eksekutif
 - (d.) semua keputusan negara dilakukan melalui voting
 - (e.) lembaga yudikatif berperan dominan dalam pengambilan keputusan

29. Dalam kampanye pemilu, banyak informasi palsu dan hoaks beredar yang bisa memengaruhi pilihan pemilih pemula secara negatif. Langkah kritis yang dapat diambil pelopor pemilih pemula untuk mencegah dampak negatif dari hoaks adalah

- ☐ a. mengedukasi teman-teman tentang cara memverifikasi informasi dan mendorong penggunaan sumber resmi
- ☐ b. mengabaikan hoaks karena terlalu banyak dan sulit dicegah
- ☐ c. membalas hoaks dengan hoaks lain agar seimbang
- ☐ d. memilih untuk tidak mengikuti pemilu agar tidak salah pilih
- ☐ e. membagikan semua informasi tanpa filter agar semua tahu

30. Saat menjadi pelopor pemilih pemula, Anda diminta untuk membuat program edukasi politik yang dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk yang kurang paham politik. Metode yang paling efektif untuk menjangkau dan mengedukasi masyarakat tersebut adalah

- ☐ a. membuat kampanye edukasi menggunakan bahasa sederhana dan media yang mudah diakses, seperti video pendek dan infografis
- ☐ b. memberikan materi pendidikan politik yang sangat detail dan akademis
- ☐ c. mengadakan seminar yang hanya bisa dihadiri oleh kalangan terpelajar
- ☐ d. menyebarkan brosur yang penuh jargon politik
- ☐ e. menyerahkan tugas edukasi kepada pihak lain tanpa ikut terlibat

B. Pilihlah semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

31. Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil proses kompromi politik yang melibatkan berbagai golongan. Proses perumusan Pancasila disebut sebagai bentuk kompromi ideologis karena

- ☐ a. menggabungkan unsur budaya barat dan timur
- ☐ b. memadukan nilai agama, nasionalisme, dan sosialisme
- ☐ c. menerapkan sistem presidensial dan parlementer sekaligus
- ☐ d. mewakili hanya satu golongan politik tertentu
- ☐ e. diambil sepenuhnya dari Piagam Jakarta

32. Penegakan hukum dan HAM merupakan cerminan dari negara yang demokratis. Namun, pelaksanaannya masih sering menghadapi kendala seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan akses terhadap keadilan, dan lemahnya sistem pengawasan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum dan HAM di Indonesia adalah

- ☐ a. mendorong transparansi dalam proses peradilan
- ☐ b. menyederhanakan proses hukum agar lebih cepat meskipun mengorbankan keadilan
- ☐ c. meningkatkan pendidikan hukum kepada masyarakat
- ☐ d. memberi impunitas kepada pejabat agar stabilitas negara terjaga
- ☐ e. memperkuat lembaga pengawasan independen seperti Komnas HAM

33. UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara seimbang mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pasal-pasal yang memuat hak seperti mendapat pendidikan, hidup layak, serta kebebasan berpendapat, juga disandingkan dengan kewajiban seperti ikut bela negara, menghormati hak orang lain, dan tunduk pada hukum. Pemahaman atas keseimbangan ini penting untuk membangun masyarakat demokratis yang bertanggung jawab. Berikut yang menunjukkan kesesuaian antara hak dan kewajiban warga negara adalah

- ☐ a. setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- ☐ b. warga negara bebas menyampaikan pendapat tanpa harus memperhatikan ketertiban umum
- ☐ c. membayar pajak dan retribusi adalah bagian dari kewajiban dalam kehidupan bernegara
- ☐ d. pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan tanpa batas usia dan jenjang
- ☐ e. warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

34. Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memberi kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertugas membina dan mengawasi agar otonomi berjalan sesuai kepentingan nasional. Sistem ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Berikut pernyataan yang benar tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah

- ☐ a. pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
- ☐ b. pemerintah pusat dapat membubarkan pemerintah daerah jika dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional
- ☐ c. hubungan antara pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ☐ d. pemerintah pusat bertanggung jawab penuh atas semua keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah
- ☐ e. pembagian kewenangan antara pusat dan daerah bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan

35. Setelah dilakukan amendemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara menjadi semakin jelas dan terstruktur. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan agar setiap lembaga dapat menjalankan fungsi secara optimal, saling mengawasi, dan tidak mencampuri urusan lembaga lain secara sepihak. Berikut ini yang termasuk salah satu kewenangan lembaga negara di Indonesia adalah

- ☐ a. Presiden dapat membubarkan DPR jika tidak menjalankan fungsi dengan baik
- ☐ b. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
- ☐ c. DPR memiliki kewenangan untuk memilih hakim konstitusi
- ☐ d. DPD memiliki kewenangan membuat undang-undang tanpa keterlibatan DPR
- ☐ e. Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI Tahun 1945

36. Integrasi nasional merupakan proses untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam menjaga keharmonisan antarkelompok, implementasi nilai-nilai gotong royong menjadi salah satu cara penting untuk memperkuat persatuan. Berikut ini yang dapat mendukung integrasi nasional dan implementasi gotong royong di Indonesia adalah

- ☐ a. meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari
- ☐ b. mengabaikan perbedaan dan memaksakan suatu kelompok untuk mengikuti norma kelompok lain
- ☐ c. mendorong kolaborasi antarkelompok dalam menghadapi tantangan bersama
- ☐ d. membatasi ruang bagi kelompok minoritas untuk mengekspresikan diri
- ☐ e. menggunakan kebijakan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi semua kelompok

37. Indonesia adalah negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan dengan memberikan otonomi kepada daerah dalam batas tertentu. Otonomi ini dimaksudkan agar daerah dapat mengatur urusan lokalnya sesuai kebutuhan. Pernyataan yang tepat terkait bentuk Negara Indonesia adalah

- ☐ a. Indonesia adalah negara federal yang membagi kedaulatan kepada daerah
- ☐ b. Indonesia adalah negara kesatuan dengan prinsip sentralisasi dan desentralisasi terbatas
- ☐ c. otonomi daerah memungkinkan daerah mengatur urusan tertentu sesuai peraturan pusat
- ☐ d. negara kesatuan berarti pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh tanpa delegasi
- ☐ e. negara kesatuan Indonesia mengakui adanya otonomi daerah, tetapi bukan kedaulatan daerah

38. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuannya untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayah dalam keberagaman. Berikut ini yang termasuk upaya menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Wawasan Nusantara adalah

- ☐ a. mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional
- ☐ b. meningkatkan toleransi dan kerja sama antarwarga di seluruh wilayah
- ☐ c. menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia
- ☐ d. menjaga kedaulatan negara dengan mengesampingkan hak warga negara
- ☐ e. memahami perbedaan sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai pemisah

39. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memberi dampak positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat perlu bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat integrasi bangsa. Dampak iptek yang berpotensi memperkuat keutuhan NKRI adalah

- ☐ a. penyebaran hoaks yang memperkeruh hubungan antarwarga
- ☐ b. pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan
- ☐ c. meningkatkan akses informasi dan wawasan kebangsaan di seluruh wilayah
- ☐ d. mendorong konsumerisme yang menjauhkan dari nilai-nilai Pancasila
- ☐ e. memperkuat kolaborasi lintas daerah melalui *platform* digital

40. Demokrasi Indonesia berkembang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu ciri pentingnya adalah partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pernyataan yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah

- ☐ a. pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- ☐ b. kekuasaan hanya dijalankan oleh presiden dan partai mayoritas
- ☐ c. rakyat dapat menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan
- ☐ d. kebebasan berpendapat dijamin selama sesuai konstitusi
- ☐ e. seluruh kebijakan hanya ditentukan oleh elit politik tanpa melibatkan rakyat

C. Pilihlah jawaban sesuai perintahnya!

41. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan nilai-nilainya berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan dasar-dasar yang telah ada.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak boleh mengalami perubahan sama sekali.	☐	☐
Nilai-nilai Pancasila bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan falsafah bangsa.	☐	☐
Pancasila bersifat dinamis dan fleksibel dalam penerapannya.	☐	☐

42. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa transparansi, pelanggaran HAM dan ketidakadilan sulit untuk diatasi.

Tentukan **Setuju** atau **Tidak Setuju** untuk setiap alasan berikut!

Alasan	Setuju	Tidak Setuju
Proses hukum sebaiknya terbuka agar masyarakat bisa mengawasi jalannya keadilan.	☐	☐
Akuntabilitas tidak perlu ditegakkan kecuali dalam kasus besar yang mendapat sorotan media.	☐	☐
Transparansi dalam lembaga hukum meningkatkan keadilan dan perlindungan HAM.	☐	☐

43. UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Keseimbangan ini penting agar terwujud kehidupan berbangsa yang adil dan demokratis.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Hak untuk memperoleh pendidikan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.	☐	☐
Membayar pajak dan retribusi bukan kewajiban warga negara.	☐	☐
Setiap warga negara memiliki hak untuk membela negara.	☐	☐

44. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan berdasarkan asas otonomi. Pembagian kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan membuat peraturan daerah karena seluruh peraturan ditetapkan oleh pusat.	☐	☐
Pemerintah pusat berwenang dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan.	☐	☐
Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan di wilayahnya.	☐	☐

45. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan signifikan setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memiliki kewenangan yang diatur dengan jelas dalam konstitusi.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR apabila dianggap tidak efektif.	☐	☐
DPR dan Presiden bersama-sama dapat mengusulkan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.	☐	☐
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan sengketa hasil pemilu.	☐	☐

46. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat Indonesia agar tercipta persatuan. Proses ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di negara yang majemuk.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Integrasi nasional hanya diperlukan dalam bidang politik dan tidak relevan dalam bidang budaya.	☐	☐
Integrasi nasional memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan dalam keberagaman.	☐	☐
Integrasi dapat terancam jika tidak ada keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.	☐	☐

47. Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan otonomi kepada daerah dalam batas tertentu. Pemberian otonomi bertujuan agar daerah dapat mengatur urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakat.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Indonesia adalah negara federal yang membagi kedaulatan secara menyeluruh ke daerah.	☐	☐
Pemerintah pusat memegang kedaulatan utama dalam negara kesatuan Indonesia.	☐	☐
Otonomi daerah memungkinkan pengaturan sebagian urusan pemerintahan secara mandiri.	☐	☐

48. UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang adil dan abadi. Indonesia mewujudkannya melalui diplomasi dan kerja sama internasional.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Indonesia rutin mengirim pasukan perdamaian ke bawah bendera PBB.	☐	☐
Indonesia hanya fokus pada perdamaian dalam negeri, tidak internasional.	☐	☐
Diplomasi adalah salah satu cara Indonesia mendorong penyelesaian konflik secara damai.	☐	☐

49. Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Sistem ini bertujuan untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Tentukan **Tepat** atau **Tidak Tepat** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Tepat	Tidak Tepat
Hanya TNI yang berperan dalam sistem pertahanan negara.	☐	☐
Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia.	☐	☐
Pertahanan semesta melibatkan militer dan nonmiliter secara terpadu.	☐	☐

50. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam bingkai sistem presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Tentukan **Setuju** atau **Tidak Setuju** untuk setiap alasan berikut!

Alasan	Setuju	Tidak Setuju
Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat karena rakyat memilih langsung wakil dan pemimpin mereka.	☐	☐
Presiden sebaiknya dipilih oleh DPR agar proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien.	☐	☐
Kebebasan berpendapat dijamin dalam demokrasi Indonesia, selama dilakukan secara bertanggung jawab.	☐	☐

FIELD TERTUTUP

TAMPILKAN NILAI